

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Kebijakan

Menurut Ealau dan Prewit sebagaimana yang dikutip oleh Edi Suharto, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip atau cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.¹

Namun, kebijakan (*police*) merupakan sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.² *Government* dimaknai sebagai pemerintah, dan *governance* diartikan tatakelola. Artinya, ada lebih banyak pihak yang dapat ikut serta menentukan kebijakan, dan penekanannya juga tidak lagi pada dominasi, melainkan pada penciptaan dan pembangunan sistem pengelolaan yang obyektif, transparan, dan demokratis.³ Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan

¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2012), 7.

²Ibid., 3.

³ Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 16.

manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara.⁴

Hal ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi-organisasi pemerintah, seperti LSM, organisasi sosial (seperti Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/ PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.⁵ Begitu juga organisasi (atau yang biasa disebut dengan ‘kepengurusan’) di lembaga pondok pesantren, salah satu lembaga atau instansi sosial berbasis keagamaan yang juga memiliki kebijakan-kebijakan.

Umumnya, kebijakan dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Menurut Rose, sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Hamdi, ia mengartikan kebijakan lebih sebagai rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan daripada hanya sekedar suatu keputusan.⁶ Oleh karenanya, proses perumusan juga termasuk dalam penelitian kebijakan.

Pondok Pesantren Lirboyo memiliki keunikan dalam hal perumusan kebijakan ekonomi di sektor kebutuhan santri. Kebijakan terkait warung, langsung melibatkan aktor-aktor pengelola warung *dalem* (bos warung) itu yang mana mereka berstatus masih “santri” sebagai *abdi dalem*. Dalam hal ini, kebijakan sosial yang orientasinya untuk seluruh kalangan pesantren

⁴ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, 3.

⁵ *Ibid.*, 4.

⁶ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 36.

(yaitu santri, yang terdiri dari aktor berupa: murid, pengurus, *abdi dalem*, *mustahiq* atau dewan guru madrasah diniyah), bahkan pembeli dari luar pondok.

B. Warung Dalem

Warung identik dengan tempat untuk berjualan makanan dan minuman. Posturnya sederhana namun memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan ‘warung *dalem*’ adalah istilah daripada warung milik kyai atau *dzuriyah* (keluarga kyai) di Pondok Pesantren Lirboyo. Pengelolanya adalah santri *abdi dalem* dalam bentuk praktik pengabdian.

Pengabdian berasal dari kata ‘abdi’ yang artinya menghambakan diri, patuh dan taat terhadap siapa saja yang kita abdi. Jadi, pengabdian merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menghambakan diri serta patuh dan taat kepada sesuatu atau siapa yang kita anggap lebih tinggi, berharga, bernilai, atau yang lebih kita pentingkan. Pengabdian dapat diartikan pelaksanaan tugas dengan kesungguhan hati atau secara ikhlas atas dasar keyakinan atau perwujudan rasa kasih sayang, cinta, tanggungjawab, dan lain-lain, kepada sesuatu.⁷

Ketika kata ‘abdi’ digabungkan dengan kata ‘dalem’, maka obyek suatu pelaksanaan pengabdian semakin jelas, kepada siapa ia mengabdikan diri. Menurut sebuah pustaka di keraton (Sasono Pustoko) sebagaimana yang dikutip oleh Fadzar Allimin, yang disebut *abdi dalem* yaitu setiap

⁷Munandar Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 1998), 93.

orang (siapa saja) yang bekerja di keraton atau yang mengabdikan kepada sang raja “*Kang sinebut abdi dalem yaiku pawongan sapa bae kang makarya ing kraton utawa ngabdikan marang ratu*”. Widodo dkk (2001), menyatakan bahwa *abdi dalem* adalah punggawa keraton; priyayi *bodining ratu* (priyayi sebagai bawahan raja), sedangkan Houben (2002) berpendapat bahwa *abdi dalem* adalah pembantu kerajaan atau pembantu istana.⁸

Dari pengertian di atas, segi kata *abdi dalem*, peneliti belum mendapatkan referensi dan pengertian yang tepat untuk istilah ini yang berada di dunia pesantren. Dari berbagai literasi, mayoritas menyebutkan bahwa *abdi dalem* adalah istilah yang sering digunakan untuk melabeli seseorang yang sedang mengabdikan di kerajaan maupun keraton. Menurut hemat peneliti, kemungkinan istilah ini mengalami transformasi makna, dari pengabdian kepada raja menuju pengabdian kepada kyai. Sehingga, seseorang yang sedang mengabdikan di rumah (*dalem*) kyai dikatakan sebagai santri *abdi dalemnya* kyai, dan penyebutan ini sudah *familiar* (tidak asing lagi) di kalangan pesantren.

Pondok Pesantren Lirboyo adalah salah satu dari berbagai pesantren yang diwarisi istilah *abdi dalem*. Di pondok ini, santri yang fokus ‘mengabdikan’ kepada kyai biasa diberi kamar khusus, disebut ‘kamar *abdi dalem*’. Berhubung di Pondok Pesantren Lirboyo ada banyak kyai dan *cak* (istilah diperuntukkan untuk putra dari kyai, dan umumnya di pondok pesantren lebih akrab dipanggil dengan istilah *gus*), sehingga terdapat

⁸ Fadzar Allimin, Taufik, dan Moordiningasih, “Dinamika Psikologis Pengabdian Abdi Dalem Keraton Surakarta Paska Suksesi”, *Indigenous, Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 2, Online, (November, 2007), dalam (journals.ums.ac.id, diakses pada 26 Februari 2018), 28-29.

beberapa kamar *abdi dalem* yang bercabang-cabang sesuai dengan (*dalem*) kiai/*cak* siapa yang mana santri itu bersedia mengabdikan diri.

Setiap *dalem* mayoritas memiliki warung sebagai institusi pemenuhan kebutuhan santri. warung inilah yang dinamai dengan warung *dalem*. Sedangkan ‘Bos Warung’ adalah istilah koordinator pemegang otoritas penuh dalam menjalankan aktivitas per-warung-an *dalem*.

C. Santri dan Pondok Pesantren

Secara etimologis, memang tidak begitu jelas asal-usul kemunculan dari kata ‘santri’ ini. Ada yang mengaitkan istilah tersebut dengan kata Melayu, *santeri* yang menurut Robson istilah ‘*santeri*’ tersebut diturunkan dari bahasa Jawa dan terkait dengan etimologi bahasa Sanskerta (*sastri*) dan bahasa Tamil (*sattiri*). Namun yang jelas, makna yang terkandung dari kedua istilah tersebut (*sastri* dan *sattiri*) adalah “terpelajar” (*learned*) atau juga bermakna “ulama” (*scholar*).⁹

Suhermanto Ja’far menambahkan, ada juga yang mengatakan bahwa kata ‘santri’ berasal dari bahasa India yaitu *shastri* yang berarti orang yang ahli tentang kitab suci agama Hindu. Menurut Zaini Muchtarom, kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti *scripture* atau *a religious or a scientific treatise* yaitu karangan agama atau uraian ilmiah; ada juga yang mengartikan santri sebagai huruf, sebab di pondok pesantren dipelajari huruf dan sastra. Masyarakat umum mengenal figur santri sebagai anak atau

⁹ Suhermanto Ja’far, *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 20.

remaja yang sedang mengaji Al-Quran atau kitab kuning, atau mereka yang pernah belajar pada seorang kyai di pondok pesantren.¹⁰

Di Indonesia, istilah ‘santri’ memiliki dua makna: *pertama*, menunjuk pada sekelompok peserta didik di sebuah lembaga pendidikan yang bernama ‘pesantren’, dan *kedua*, menunjuk pada akar budaya sekelompok pemeluk agama Islam.¹¹ Sedangkan Zamakhsyari Dhofier membagi santri menjadi dua kelompok:

1. *Santri mukim* yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren tersebut biasanya suatu kelompok tersendiri yang memegang tanggungjawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari; mereka juga memikul tanggungjawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.¹²

2. *Santri kalong* yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (*nglajo*) dari rumahnya sendiri.

Dalam perspektif identitas keagamaannya, terjadi banyak varian model. Menurut Clifford Geertz, golongan ‘santri’ atau kebudayaan santri, adalah varian masyarakat (Jawa) Indonesia dimana unsur kebudayaan Islam merupakan unsur yang paling dominan. Secara keagamaan, pusat

¹⁰Ibid., 20-21.

¹¹Ibid., 22.

¹²Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1994), 52.

kebudayaan santri adalah masjid. Sementara secara ekonomis, pusat kebudayaan santri adalah pasar karena kebanyakan dari mereka adalah para pedagang, dan secara sosial basis kebudayaan santri adalah desa-desa yang berada di pinggiran kota yang menjadi basis perdagangan mereka. Golongan santri ini mengutamakan kemurnian doktrin agama.¹³ Sedangkan, santri tidak akan lepas dari pondok pesantren itu sendiri. Adapun karakteristik budaya pesantren di antaranya:

a. Modeling

Modeling di dalam ajaran Islam bisa diidentikkan dengan *uswatun hasanah* atau *sunnah hasanah*, yakni contoh yang ideal yang selayaknya diikuti dalam komunitas ini tidak menyimpang dari ajaran dasar Islam. Jika dalam dunia islam, rasulullah adalah pemimpin dan panutan sentral yang tidak perlu diragukan lagi. Dalam masyarakat santri jawa, kepemimpinan Rasulullah diterjemahkan dan diteruskan oleh walisanga yang dikemudian hari sampai kini menjadikan mereka kiblat kedua setelah nabi. Dalam hal ini yang termasuk modeling adalah tradisi *amar ma'ruf nahi munkar* di dunia pesantren. Di dunia pesantren, dakwah islamiyah (*amar ma'ruf nahi munkar*) tidak hanya diimplementasikan dalam kata-kata, tapi juga dengan tingkah laku (*da'wah bil hal*).

¹³ Suhermanto Ja'far, *Pasang Surut Politik Kaum Sarungan*, 23.

b. Cultural Maintenance

Mempertahankan budaya dan tetap berdasar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Sikap ini sering disalah-artikan oleh sarjana Barat seperti memusatkan perhatian studi tentang Islam berwajah Hindu-Budha sebagai induk budaya Jawa, sementara Islam dipandang sebagai anak budaya. Sekali lagi, walisanga dan para kyai Jawa adalah *agent of social change* melalui pendekatan kultural, bukan politik struktural apalagi kekerasan. Hal demikian ini (pengaruh walisanga dan kyai) juga dapat mempengaruhi kultur pemikiran murid. Bisa dilacak dalam hal pemikiran para santri lebih cenderung terhadap pemikiran ulama, melalui buku (kitab-kitab) yang dikaji. Mencetak religiusitas santri lebih bertendensi pada akhlak ulama, pemikiran santri cenderung pada metode berfikir intelektualitas ulama. Sehingga kaum santri lebih memprioritaskan kemoderatan dalam berfikir dan berijtihad (*background* ulama salaf).

c. Budaya Keilmuan yang Tinggi

Dunia pesantren identik dengan dunia ilmu. Jika dalam masa keemasan Islam, tradisi *ar-rihlatu fi thalabi al-'ilmi* (pengembaraan menuntut ilmu) demikian luar biasa sebagaimana yang tercermin dalam perjalanan intelektual Imam Bukhari, sejarah telah membuktikan bahwa *rihlah* yang sama berkembang sepanjang masa masyarakat santri. tradisi *rihlah* ini pula telah mengantarkan dua tokoh

pesantren utama: Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfudz At-Tirmisi, mengembara sepanjang hidupnya dan menjadi guru besar di Makkah dan Madinah.¹⁴

Oleh karenanya, pandangan Martin Van Bruinessen, bahwa pondok pesantren bisa dianggap lembaga yang khas Indonesia. Meskipun ia merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional, namun dalam beberapa aspek, berbeda dengan sekolah tradisional di dunia Islam mana pun. Di sisi lain, pada saat yang sama, ia berorientasi internasional, dengan Makkah sebagai pusat orientasinya, bukan Indonesia.¹⁵

D. Teori yang Digunakan

Dalam menganalisis kasus di tengah kebijakan penyetaraan warung dalem di Pondok Pesantren Lirboyo, peneliti menggunakan teori rasionalitas tindakan Max Weber dengan dikomparasikan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas. Kemudian, dalam permasalahan implementasi kebijakannya, peneliti menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Adapun cara kerja masing-masing teori tersebut sebagaimana berikut.

D.1 Rasionalitas Tindakan Max Weber

Rasionalisasi adalah konsep induk yang melaluinya budaya mendefinisikan situasi-situasi keagamaan, dan yang melaluinya sosiologi agama dapat memahami definisi-definisi budaya untuk

¹⁴Abdurrahman Mas'ud, "Memahami Agama Damai Dunia Pesantren" dalam *Peranan Pesantren Dalam Mengembangkan Budaya Damai*, Ed: Nuhrison M. Nuh (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), 25-33.

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), 21.

situasi-situasi tersebut.¹⁶ Rasionalitas terdiri atas, *pertama*, pengklarifikasian, penspesifikasian, dan pensistematisasian ide-ide secara intelektual. *Kedua*, rasionalisasi mencakup kontrol normatif atau sanksi. *Ketiga*, mengandung ‘komitmen motivasi’ yang tidak hanya berisi keyakinan, tapi juga komitmen praktis.¹⁷

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Perbedaan pokok yang diberikan adalah antara tindakan *rasional* dan tindakan *nonrasional*. Singkatnya, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.¹⁸ Sedangkan menurut Arisandi, tindakan rasional yaitu tindakan sosial yang penuh makna melewati serangkaian proses berpikir dan dilakukan secara sadar, bukan sekedar respons dari stimulus.¹⁹

Berhubungan dengan rasionalitas manusia, Weber membagi tindakan sosial manusia menjadi empat: tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Adapun tindakan sosial tipe ketiga dan keempat (yang nonrasional) adalah subtype dari kedua tindakan yang pertama.

¹⁶Max Weber, *Sosiologi Agama*, Penerj: Yudi Santoso (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 36

¹⁷Ibid., 36-37.

¹⁸Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi*. Penerj: Robert M. Z. Lawang, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 220.

¹⁹Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 66.

a. Rasionalitas Instrumental (*Zweckrationalitat*)

Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan *tujuan* tindakan itu dan *alat* yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar kriterium menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing ini. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih.²⁰

b. Rasionalitas Nilai (*Wertrationalitat*)

Sifat rasionalitas nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar. Sementara itu, tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat mutlak. Contoh, perilaku seseorang yang memberi tempat duduk kepada penumpang yang sudah lanjut usia. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial ataupun agama yang ia anut.²¹ Orang yang beragama menilai pengalaman subyektif mengenai kehadiran Allah bersamanya atau perasaan damai dalam hati, atau dengan

²⁰Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi*, 220.

²¹Herman Arisandi, *Buku Pintar Sosiologi*, 67.

manusia, seluruhnya suatu nilai akhir dimana dalam perbandingannya nilai-nilai lain menjadi tidak penting.²²

c. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seorang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional.²³

d. Tindakan Afektif

Tindakan sosial ini termasuk nonrasional, tindakan sosial yang lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual serta perencanaan sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif.²⁴

Namun, dalam realita santri *abdi dalem* di Pondok Pesantren Lirboyo, peneliti hanya memakai dua rasionalitas, instrumental dan nilai. Dalam proses inilah nubuat bisa dipahami, suatu proses terobosan menuju tatanan budaya lebih tinggi –lebih rasional dan sistematis– sebuah ranah di tingkat etika agama, yang pada gilirannya muncul konsep Weber tentang ‘kharisma’.²⁵

²²Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi*, 221.

²³Ibid., 221.

²⁴Ibid.

²⁵Max Weber, *Sosiologi Agama*, 38.

Tentang kharisma ini, Reinhard Bendix mengutip Max Weber yang mendefinisikan “kharisma” sebagai kualitas tertentu dari seorang individu yang karenanya ia berbeda jauh dari orang-orang biasa dan dianggap memiliki kekuatan atau sifat supernatural, manusia super, atau setidaknya luar biasa. Kualitas ini dianggap tidak bisa dimiliki oleh orang biasa, tetapi dianggap bersumber dari Tuhan, dan atas dasar itu individu yang bersangkutan diperlakukan sebagai pemimpin.²⁶ Oleh karenanya, meski kharisma berawal dari konsep nubuat (kenabian), tetapi itu hanyalah sekedar prototipe saja dan pada akhirnya kharisma dapat dikontekskan pada sosok kyai dalam domain Pondok Pesantren Lirboyo.

D.2 Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas

Perumusan kebijakan penyetaraan harga ini dilakukan dengan cara diskusi. Hal ini sesuai dengan tujuan Habermas, yaitu menantikan dan menjustifikasi masyarakat dunia ‘yang lebih baik’, yakni masyarakat yang dapat menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk berbahagia, berdamai, dan berkumpul. Karena Habermas juga merupakan seorang rasionalis, baginya, “masyarakat yang lebih baik adalah masyarakat yang lebih rasional, dengan kata lain, masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan bersama, bukan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang.”²⁷

²⁶Reinhard Bendix, “Refleksi Tentang Kepemimpinan Kharismatis” dalam *Max Weber: Sebuah Khazanah*, Penerj: A. Asnawi (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), 261.

²⁷ Michael Pusey, *Habermas: Dasar dan Konteks Pemikirannya* (Yogyakarta: Resist Book, 2011), 3.

Sehingga, mengenai ‘konstruk nalar pengetahuan manusia’, bagi Habermas, ia diperoleh melalui perbincangan-perbincangan rasional dalam sebuah ruang bebas yang emansipatoris. Habermas menyebutnya sebagai “ruang publik” yang steril dari dominasi. Pertukaran ide antarindividu tersebut pada akhirnya menciptakan konsensus sosial yang disepakati.²⁸

Untuk mendalami ‘kasus’ (kebijakan penyetaraan harga warung *dalem*) tersebut, maka peneliti menggunakan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas untuk mengetahui bagaimana rasionalitas komunikatif dalam proses perumusan kebijakan yang diselenggarakan oleh pengurus Jam’iyah Pusat Al-Khidmah. Teori ini sebagai alat analisis di ranah diskursus perumusan kebijakan penyetaraan harga oleh santri-santri *abdi dalem*.

Teori tindakan komunikatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsekuensi kenyataan, sebagai bukti yang mendalam, bahwa bahasa merupakan sebuah media interaksi sosial.²⁹ Ide Habermas mengenai tindakan komunikatif mengandaikan kapabilitas perbincangan dan tindakan di dalam orbit argumentasi rasional.³⁰ Sebab, rasionalisasi tindakan komunikatif menghasilkan komunikasi yang bebas dari dominasi, komunikasi yang bebas dan terbuka. Di sini, rasionalisasi

²⁸Listiyono Santoso dan I Ketut Wisarja, “Epistemologi Jürgen Habermas” dalam *Epistemologi Kiri*, Ed: Listiyono Santoso (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 218.

²⁹John B. Thompson, *Analisis Ideologi Dunia*, Penerj: Haqqul Yaqin (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 398.

³⁰Ambo Upe, *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 258.

meliputi emansipasi, “menghilangkan pembatasan-pembatasan pada komunikasi.

Bagi Habermas, jika kita bermaksud melakukan emansipasi, maka pemahaman praksis tidak dapat dimaknai sebagai kerja, karena pemahaman praksis sebagai kerja justru akan melahirkan realitas saling menakutkan untuk menciptakan dominasi baru.³¹ Menariknya, epistemologi Habermas memiliki dua kaki:

1. Berhubungan dengan kognitif-teknis yang menggunakan paradigma kerja. Paradigma kerja menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana menguasai, mengontrol, dan memanfaatkan alam.
2. Berhubungan dengan moral-praktis, berupa hubungan relasi sosial melalui paradigma komunikatif. Paradigma ini melahirkan sebuah pengetahuan kemanusiaan yang bebas dari dominasi.³²

Artinya, kita sadari bahwa rasionalitas kerja biasa diaplikasikan untuk saling berkompetisi, bersaing, mendahului dan mendominasi. Suatu pedagang yang membuat harga komoditasnya ‘lebih’ murah, pedagang yang satunya memiliki toko yang lebih elit, dan sebagainya dapat memicu ketidakseimbangan sosial dalam kompetisi perebutan konsumen, dengan berbagai metode. Pada intinya, logika kerja membawa masyarakat pada karakter saling mendominasi.

³¹Ibid.

³² Listiyono Santoso dan I Ketut Wisarja, “Epistemologi Jurgen Habermas”, 218.

Dalam teori tindakan komunikatif, masyarakat tidak lepas dari melakukan tindak-ucap. Menurut Habermas, pengguna bahasa membuat penawaran (klaim validitas/ klaim keabsahan) dimana pendengar dapat menerima atau menolak. Penawaran atau klaim validitas ini dapat diterima tergantung alasan dan latar belakang. Alasan dan latar belakang ini terdapat “kekuatan motivatif yang bersifat rasional” yang bekerja saat terjadi komunikasi.³³

Menurut Habermas, paling tidak terdapat tiga jenis klaim validitas yang muncul ketika melakukan tindak ucap. Seorang yang berbahasa pasti memunculkan klaim (a) bahwa pernyataan yang dibuat ‘benar’ [*true*] atau memuaskan, (b) bahwa tindak ucapnya ‘benar’ [*correct*] berdasarkan konteks normatif yang berlaku, dan (c) bahwa maksud si pengguna bahasa ‘*bersungguh-sungguh*’ dalam mengatakan sesuatu. Dalam memunculkan tiga klaim tersebut, pengguna bahasa menjalin hubungan dengan salah satu dari tiga objek atau ‘dunia’, dengan anggapan bahwa sebuah klaim dapat direbut oleh seorang pendengarnya; (a) *dunia objektif* sebagai totalitas entitas mengenai apakah pernyataan yang benar itu mungkin, (b) *dunia sosial* sebagai totalitas relasi interpersonal yang diatur berdasarkan legitimasi, dan (c) *dunia subjektif* sebagai totalitas pengalaman yang di situ pengguna bahasa memiliki akses yang istimewa.

³³John B. Thompson, *Analisis Ideologi Dunia*, 399.

Masing-masing tiga klaim validitas dan relasi dunia yang sesuai dibawa masuk ke dalam permainan melalui model penggunaan bahasa tertentu. (a) tindak ucap *constative* dengan fungsi representatif yang menekankan klaim kebenaran dan relasinya dengan dunia objektif, (b) tindak ucap *regulatif*, seperti perintah atau permohonan, mencerminkan apa yang disebut dengan *appellative* atau model interaktif pengguna bahasa; model ini menekankan klaim kebenaran dan relasinya dengan dunia sosial, dan (c) tindak ucapan yang memungkinkan pengguna bahasa membuka subjektifitasnya; dalam kasus ini kita memerlukan fungsi ekspresif yang menyoroti klaim kesungguhan hati dan hubungannya dengan dunia subjektif.³⁴

Dalam situasi sidang penyetaraan harga di Pondok Pesantren Lirboyo, tindakan komunikatif yang dilakukan oleh para santri *abdi dalem* adalah klaim validitas berdasarkan konteks yang berlaku, yang berhubungan dengan dunia sosial serta dimasukkan pada model tindak ucap *regulatif*. Ketiganya merupakan ‘tindakan yang diorientasikan untuk mencapai pemahaman’.

D.3 Strukturasi Anthony Giddens

Dalam hal implementasi kebijakan, peneliti memakai teori strukturasi Anthony Giddens sebagai analisa kepatuhan agen dalam melaksanakan struktur aturan-aturan main di warung-warung *dalem* tersebut.

³⁴Ibid., 400

Dalam literatur sosiologi, struktur selalu dipahami dalam satu kuasi mekanis, kuasi visual, seperti penyangga bangunan, atau seperti pola-pola hubungan sosial.³⁵ Namun, gagasan tentang struktur (atau struktur sosial) tentu saja sangat menonjol dalam karya-karya dari kebanyakan penulis dan telah menjadi identik dengan tradisi ‘strukturalisme’, dan perhatian para penulis fungsionalis dan para kritikus mereka lebih banyak tertuju pada gagasan tentang ‘fungsi’ ketimbang ‘struktur’, akibatnya struktur lebih banyak dipakai sebagai sebuah gagasan yang diterima begitu saja.³⁶

Bagi Giddens, istilah struktur mengacu pada perangkat aturan dan sumber daya yang bergerak yang digunakan oleh agen untuk bertindak.³⁷ Di samping struktur sebagai penggerak tindakan masyarakat secara tunggal, Giddens mengemukakan “dualitas struktur” dan menyatakan bahwa “struktur sosial” dan “*agent*” atau “tindakan” sama-sama ada dan berperan dalam dunia sosial. Setiap tindakan produksi secara bersamaan adalah reproduksi: struktur yang memungkinkan satu tindakan (agen) memungkinkan untuk dikembangkan.³⁸

Dalam tataran agen, Giddens membuat model stratifikasi agen.

(a) monitoring tindakan, para aktor tidak hanya memonitoring terus

³⁵Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme: Teori dan Metode* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),152.

³⁶Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Penerj: Maufur & Daryatno(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 25.

³⁷Akhyar yusuf Lubis, *Postmodernisme*,148.

³⁸*Ibid.*,151.

menerus tindakannya dan berharap agar orang lain melakukan hal yang sama terhadap aktivitasnya sendiri. Dalam arti, kemampuan agen dalam menjelaskan tindakannya, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, serta alasan mereka mengapa bertindak sesuai dengan pemberian alasan-alasan terhadap tindakan tersebut,³⁹ (b) rasionalitas tindakan, bahwa para aktor mempertahankan suatu ‘pemahaman teoritis’ yang terus-menerus tentang landasan-landasan aktivitasnya, dan (c) motivasi tindakan, mengacu kepada keinginan-keinginan yang mendorongnya.⁴⁰ Di samping itu, ada tritunggal psikoanalitika yang berupa bawah sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis.⁴¹

Sedangkan menurut Giddens, struktur adalah aturan dan sumber daya/ sarana, atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial.⁴² Aturan-aturan dan sumber-sumber yang membentuk struktur dapat dilihat sebagai sifat sistem sosial. Sistem sosial adalah bentuk interaksi yang teratur yang terdapat pada individu atau kelompok. Ketika praktik-praktik sosial yang teratur tersebut terstruktur melalui aturan-aturan dan sumber-sumber dan secara mendalam terlapis dalam ruang dan waktu, melintasi beberapa dekade dan wilayah yang sangat luas, Giddens justeru berbicara tentang ‘institusi’. Institusi adalah sekumpulan

³⁹John B. Thompson, *Analisis Ideologi Dunia*, 216.

⁴⁰Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 7-9.

⁴¹John B. Thompson, *Analisis Ideologi Dunia*, 216.

⁴²*Ibid.*, 40.

praktik-praktik yang membentuk sistem sosial; ia dapat dibedakan berdasarkan modalitas sentral pembentuk strukturasinya.⁴³

Dalam ranah struktur, Giddens membuat prinsip-prinsip struktural yang mendasar, yaitu legitimasi, dominasi, dan signifikasi. Modalitas/ sarana-antara strukturasi berfungsi menjelaskan dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi, menghubungkan kapasitas mengetahui para agen dengan bagian-bagian struktural.⁴⁴



⁴³Ibid., 220.

⁴⁴Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, 45.